

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi/ Deflasi Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2022

No	Bulan (2022)	Inflasi/deflasi bulanan%	Inflasi/deflasi Kumulatif (ytd)%	Inflasi/Deflasi Tahunan (yoy)	Komoditi Penyumbang Inflasi/Deflasi	Penyebab
1	Juli	0,76	5,15	6,26	cabe merah, angkutan udara, bawang merah, daging ayam ras dan tomat	berkurangnya stok komoditi akibat cuaca dan produksi, dan permintaan mengalami kenaikan.
2	Agustus	-0,82 (deflasi)	4,29	5,44	cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, minyak goreng, dan tarif angkutan udara	Penurunan harga yang cukup signifikan dibanding bulan sebelumnya, namun komoditi beras dan telur ayam ras alami kenaikan harga
3	September	1,26	5,60	6,70	bensin, beras, tarif angkutan roda 2 online dan angkutan dalam kota	adanya kenaikan harga yang ditetapkan pemerintah terhadap harga BBM

Beberapa komoditi pangan (volatile food) pada triwulan III cenderung mengalami kenaikan pada beberapa komoditi pangan yaitu beras dan daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah dan bawang merah.

Sedangkan komoditi penting lainnya yang mengalami kenaikan pada bulan september adalah Bensin, solar, tariff angkut beroda dua online dan angkutan dalam kota. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan dari pemerintah pusat tepatnya tanggal 3 september 2022, terhadap harga BBM termasuk harga BBM bersubsidi petralite. Yang sebelumnya 1 liter petralite Rp 7.650 menjadi Rp. 10.000, begitupun dengan solar dan lainnya. Kenaikan BBM menyebabkan kenaikan terhadap harga beberapa komoditi yang secara tidak langsung seperti naiknya harga komoditi pangan dikarenakan kenaikan biaya operasional atau biaya angkut.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Ketidakpastian global masih membayangi dan menyebabkan kenaikan pasokan energy mengakibatkan naiknya harga minyak goreng yang bahan bakunya merupakan salah satu bahan baku bahan bakar dan secara tidak langsung mengakibatkan kenaikan pada beberapa bahan pangan lainnya. Dan Akhirnya pemerintah mengumumkan kenaikan BBM termasuk juga dengan BBM bersubsidi.

Beberapa komoditi pangan pada triwulan III cenderung mengalami kenaikan pada beberapa komoditi pangan yaitu beras dan telur ayam ras dan komoditi penting lainnya adalah Bensin, solar, tarif angkut beroda dua online dan angkutan dalam kota. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan dari pemerintah pusat tepatnya diumumkan pada tanggal 3 september 2022, kenaikan terhadap harga BBM termasuk harga BBM bersubsidi petralite. Yang sebelumnya 1 liter petralite Rp 7.650 menjadi Rp. 10.000, begitupun dengan solar dan lainnya. Kenaikan BBM menyebabkan secara tidak langsung mempengaruhi kenaikan harga komoditi pangan dikarenakan kenaikan biaya operasional atau biaya angkut. Hal ini juga akan mempengaruhi daya beli dari masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Setelah Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM, dampak yang akan terjadi akan menimbulkan gejala dimasyarakat, Pemerintah Pusat sigap dengan langsung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyikapi kondisi yang akan terjadi menghindari ketidak amanan di masyarakat.

Pemerintah Pusat meminta agar Pemerintah dapat memanfaatkan Belanja Tak Terduga (BTT) dan Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 dengan mengalokasikan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU).

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III berupaya menindaklanjuti dengan melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan opd terkait. Beberapa program yang telah dilakukan dalam upaya melalui strategi 4K:

1. Upaya pemenuhan **Ketersediaan pasokan** melalui;
 - Pelaksanaan program unggulan Sumsel Mandiri Pangan berupa pemberian bibit pertanian (bibit ikan, ayam dan bibit tanaman) untuk rumah tangga miskin di 17

kab/kota Sumatera Selatan dan pemberian perlengkapan budidaya perikanan di 17 kabupaten/kota;

- Pengembangan sentra bawang merah di Kabupaten Musi Rawas Utara melalui penyediaan bibit bawang merah serta pelatihan budidaya;
- Pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari di Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau, (iv) implementasi GASSPOL (Palembang jaGa pASokan, harga, diStribusi lewat Pasar OnLine) melalui aplikasi Bajolbae yang diterapkan di 10 (sepuluh) pasar;
- Implementasi digital farming pada klaster cabai dan bawang merah binaan BI Sumatera Selatan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mendukung ketersediaan pasokan pangan dengan inisiasi gerakan tanam cabai dan sayuran l dengan penyaluran 77.777 bibit cabai merah (termasuk bayam, kangkung, Ph meter) di Kab. OKUT, 250 paket benih cabai merah dantomat dalam kegiatan Beli Kreatif Sumsel, dan 200 paket benih cabai merah dan terong kepada Perhiptani Palembang sebagai bagian dari upaya GNPIP, dan 150 paket benih dalam kegiatan Temu Responden dan Sarasehan Pengendalian Inflasi Pangan. Dan Pengembangan Hidroponik sayuran di Pondok pesantren.
- Kunjungan lapangan dan peninjauan Kerjasama Antar Daerah dengan Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Juli.

2. Upaya **Keterjangkauan harga** melalui;

1). Monitoring harga komoditas bahan pokok secara harian oleh dinas terkait, seperti dinas perdagangan, dinas ketahanan Pangan dan peternakan;

2). Pelaksanaan pasar murah komoditas pangan pada 21-22 September 2022 di halaman Kantor oleh Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Prov. Sumsel putih melibatkan Toko Tani Indonesia Center Sumsel, UMKM mitra BI, serta distributor pangan lainnya;

- Pembelian Beras setiap bulannya oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikoordinir oleh OPD masing-masing bekerja sama dengan perum Bulog, sebagai himbauan dari Gubernur Sumatera Selatan untuk menggunakan beras petani lokal dalam rangka menekan harga dan menjaga tingkat inflasi pada komoditi
- Dinas Pertanian Prov. Sumsel menggelar Pasar Tani secara rutin setiap rabu dan jumat untuk komoditas pangan seperti daging ayam ras, beras dan telur bekerja sama dengan distributor dan Gapoktan binaan; serta
- kegiatan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) komoditas pangan, khususnya oleh Perum Bulog;

3. Memastikan **Kelancaran distribusi** dengan;

1). Melakukan sidak pasar komoditas dan khususnya ketika terjadi kenaikan harga;

2). Memprioritaskan angkutan komoditas bahan pangan, BBM dan komoditas strategis lainnya selama masa pandemi; dan

3). Optimalisasi pemanfaatan aplikasi “Market Place Sibejajo”.

4). Pelaksanaan kunjungan TPID Provinsi Sumsel ke Food Station Jakarta d.r inisiasi untuk komoditas beras.

KAD

4. **Komunikasi yang efektif** melalui;

Rapat terbatas TPID dan Rapat koordinasi TPID Sumsel tanggal 7 dan tanggal 19 September 2022 dipimpin oleh Sekda Sumsel dalam rangka membahas upaya pengendalian inflasi daerah dan optimalisasi Belanja Tidak Terduga untuk pengendalian Inflasi (19/9) serta

- Koordinasi pengendalian inflasi oleh TPID di wilayah Provinsi Sumatera Selatan melalui whatsapp group
- Pelaksanaan rapat di tingkat Provinsi Sumsel maupun Kab/Kota seperti di Kab. Muaraenim, Ogan Komering Ilir (OKI), Kab. Banyuasin dsb ; serta koordinasi secara rutin whatsapp group TPID Kota dan Kab.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dan Pelaksanaan Operasi Pasar/pasar murah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pangan tetap dilaksanakan sebagai bantalan pertahanan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan saat ini khususnya untuk menjaga stabilitas harga komoditi bahan pangan pokok dan BBM maupun BBM Subsidi, sejak adanya kenaikan BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menyebabkan kenaikan beberapa komoditi pangan lainnya hal ini cukup memberatkan masyarakat yang sebelumnya kena imbas dari pandemic corona, kenaikan harga minyak goreng dan harga BBM akan sangat mempengaruhi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pemerintah Daerah telah berupaya menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Pusat untuk memanfaatkan Belanja Tak Terduga dengan mengeluarkan keputusan Gubernur dan Pengalokasian Belanja Transfer Umum APBD sebesar 2%. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu yang kemungkinan akan kena dampak inflasi akibat dari kenaikan BBM dan komoditi bahan baku penting lainnya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Diharapkan agar tetap melakukan koordinasi yang berkelanjutan dari anggota TPID dalam rangkaantisipasi terhadap kenaikan harga barang pokok dan penting.
2. Mendorong percepatan Pelaksanaan Pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung kelancaran produksi dan distribusi bahan pangan.
3. Mengelola ekspektasi masyarakat melalui proses komunikasi dan publikasi mengenai informasi mengenai ketersediaan Komoditas Pangan dan komoditi penting lainnya.
4. Pemerintah Daerah tetap perlu bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/kota, distributor/produsen Minyak Goreng dan Beras, BUMN, BUMS dan pihak lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan koordinasi maupun untuk mengadakan operasi pasar dan pasar murah, dalam rangka keterjangkauan harga komoditi dikarenakan kenaikan harga BBM. Dengan Demikian diharapkan tidak terdapat gejolak di masyarakat yang akan menimbulkan hal yang anarki yang tidak diinginkan.
5. OPD terkait yang memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Umum agar dapat memanfaatkan segera dengan program yang tepat dalam

◦

penanganan pengendalian inflasi saat ini.